

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kewenangan daerah dan berkurangnya kontrol pemerintah pusat, telah melahirkan semangat masyarakat untuk mengisi otonomi daerah dengan lebih bermakna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka sendiri.¹ Pembangunan di pedesaan merupakan suatu proses peningkatan kemampuan penduduk desa dalam menguasai lingkungan sosial.²

Selama 70 tahun, negara Indonesia telah berkembang di banyak bidang tetapi secara tidak sengaja menciptakan *backlog* masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang lebih mementingkan pada pertumbuhan ekonomi justru telah menciptakan disparitas regional yang lebih besar. Sumber daya dan investasi diserap dan terpusat di kota-kota dan wilayah pertumbuhan, sementara itu daerah tengah mengalami eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Sebagai gambaran ketimpangan yang terjadi antara perkotaan dan pedesaan, Indonesia bagian timur dan barat, serta pulau jawa dan luar pulau jawa. Memang, selama ini, bidang ekonomi semakin membaik, dan seiring dengan itu terjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, perkembangan ini perlahan menurun seiring dengan meningkatnya kesenjangan.³

Proses pembangunan selalu menghadapi masalah tersedianya barang dan jasa di satu sisi dan perlindungan sumber daya alam di sisi yang lain. Karena minat dan kondisi setiap orang berbeda, pengorbanan ini tidak dapat dihindari. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, permintaan akan ketersediaan barang dan jasa cenderung meningkat. Artinya, sumber daya terutama sumber daya alam, sering kali dieksploitasi secara berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan (*environmental degradasi*). Pembangunan desa seringkali mengabaikan dampak lingkungan dari pembangunan tersebut.

¹ Abdul Gaffar Karim, *Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 174.

² Mubyarto, *Profil Desa Tertinggal Indonesia 1994*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1995), 35.

³ Ahmad Sholeh, "Strategi Pengembangan Potensi Desa", *Jurnal Sungkai* Vol. 5, No.1 (2017), 32.

Sebagai bagian terkecil negara, desa secara langsung mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Terdapat 74.093 desa di Indonesia, lebih dari 32.000 di antaranya tergolong desa tertinggal. Strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan mendirikan kewirausahaan pedesaan, di mana masyarakat pedesaan secara spontan menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk mengubah kondisi sosial pedesaan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 yang mewajibkan terbentuknya desa mandiri dalam pengelolaan sumber daya secara mandiri, diharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian desa. Dalam hal lain, desa juga mempunyai keterbatasan. Di sisi lain, Modal ekonomi desa lebih kecil dari pada modal sosial. Modal sosial yaitu jaringan sosial, jembatan sosial dan ikatan sosial. Jenis modal sosial ini sempit, jenis modal sosial yang terbatas, dan tidak bisa mendorong pembangunan ekonomi.⁴

Kesejahteraan adalah impian dan harapan setiap masyarakat. Allah telah menjamin kesejahteraan bagi makhluk dan hambanya yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6 *“Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya”* namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra’d ayat 11 *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*.⁵

Bagi pemerintah, kesejahteraan biasanya dilihat dari produk nasional bruto (GNP) per kapita, namun jika ketika melihat realitas sosial, kesimpulan bahwa ukuran yang baik yang dilandaskan pada GNP per kapita tidak tepat, karena di desa banyak masyarakat yang menjalani kehidupan di bawah standar kelayakan hidup.⁶

⁴ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul Yogyakarta”, <http://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/viewFile/848/783> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10:12 WIB.

⁵ Amirus Shodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, 2015, 381.

⁶ Amirus Shodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, 382.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu lembaga atau badan usaha yang dijalankan untuk pembangunan desa. BUMDES pada hakikatnya adalah salah satu tahapan pemerintah pusat dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi diharapkan masyarakat pedesaan dapat memperoleh kemandirian untuk maju. Dengan adanya BUMDES diharapkan dapat menciptakan industri kreatif yang dapat memberdayakan masyarakat. Dan diharapkan tidak Akan ada orang pedesaan lagi yang bermigrasi ke kota hanya untuk mencari pekerjaan.

Secara umum, tujuan awal didirikannya BUMDES adalah untuk mendorong segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kegiatan ekonomi masyarakat.⁷ BUMDES sebagai perangkat swadaya desa bermaksud mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan desa.⁸

BUMDES juga harus mampu merangsang dan menggerakkan roda perekonomian pedesaan. Aset ekonomi desa harus sepenuhnya dikelola oleh masyarakat.⁹ Desa melalui pelibatan langsung aset kekayaan desa yang dipisahkan untuk pengelolaan aset serta upaya-upaya lain untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰

Misalnya, peran Pemerintah Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kabupaten Batu dalam pengelolaan BUMDES, yaitu pembentukan dan partisipasi dalam pengawasan program kerja yang diselenggarakan oleh BUMDES, khususnya Badan Kesejahteraan Sosial Desa (BKD) dan Himpunan Pemakai Air Minum (HIPPAM) dalam bersama-sama mengelola hasil

⁷ Mugni Rizki Junaedi, "Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Ciamis", *Jurnal Moderat*, Vol. 4, No. 3, 2018. 147.

⁸ Puguh Buiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Bojonegoro", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4, No. 1, 2015, 117.

⁹ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, "Keberadaa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, 1069.

¹⁰ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul Yogyakarta", 156.

BUMDES untuk pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹

Desa garung Lor saat ini juga memiliki BUMDES yang bernama “Makmur Mandiri” dengan berbagai unit usaha. Seperti tempat penitipan sepeda, penyewaan gedung serba guna, PAMSIMAS, dan pengelolaan sampah. Letak desa Garung Lor sendiri cukup strategis untuk mengembangkan beberapa usaha, selain letaknya yang berada di pinggir jalan Kudus-Jepara desa Garung Lor didukung dengan adanya beberapa pabrik besar dan lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti Bank, Rumah Sakit, Kepolisian dan Pendidikan. Selain itu keberadaan UMKM di desa Garung Lor juga menambah potensi desa untuk mengembangkan beberapa unit usaha.

Penelitian Dendhi Agung Nugroho, dengan judul “Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)” menyatakan bahwa BUMDES menyusun misi yang jelas yaitu mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat Babadan utamanya masyarakat kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). BUMDES membangun unit-unit usaha seperti unit Simpan Pinjam, unit Kredit Sepeda Motor, dan unit sektor riil penyewaan lahan bengkok desa.¹²

I Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana dalam Majalah Ilmiah FISIP, Volume 9, Nomor 1, (2018). Dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng”. Juga mengatakan peran pemerintah desa sebagai pembaruan, diindikasikan dengan memberikan kekuatan bagi BUMDES untuk menerapkan program desa. yang bertujuan untuk

¹¹ Valentine Queen Chintary, Asih Widi Lestari, ”Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 2, (2016), 60.

¹² Dendhi Agung Nugroho, Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015), *JESP*, Volume 7, Nomor 2, 2015.

memerangi menanggulangi pengangguran melalui program pelatihan kejuruan.¹³

Muh. Sayuti. Dengan judul “Pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala”. Mengemukakan tentang karakteristik BUMDES sebagai sebuah institusi pemberdayaan masyarakat yaitu menjadikan BUMDES sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan dan layanan pada masyarakat.¹⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang menjelaskan tentang proses pelaksanaan dan implementasi program BUMDES untuk kesejahteraan desa. Pembangunan masyarakat pedesaan tidak hanya terfokus pada peningkatan ekonomi tetapi juga pada pembangunan sosial.

Adanya permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang keadaan BUMDES untuk kesejahteraan masyarakat dengan judul **“POTRET BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS PUBLIC WELFARE (STUDI KASUS DI DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan terbilang sebagai penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang langsung dilakukan pada BUMDES di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, objek penelitiannya yaitu berupa objek di lapangan yang sekiranya mampu memberi informasi tentang penelitian. Adapun fokus penelitian yang diteliti adalah tentang potrer Badan Usaha Milik Desa berbasis kesejahteraan masyarakat di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

¹³ I Kadek Darwita, Dewa Nyoman Redana, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Majalah Ilmiah FISIP, Volume 9, Nomor 1, 2018

¹⁴ Muh. Sayuti, Pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala, Jurnal Academica, Volume 3, Nomor 2, 2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berbasis *Public Welfare* di Desa Garung Lor?
2. Bagaimana Dampak Badan Usaha Milik Desa Berbasis *Public Welfare* pada Kesejahteraan Masyarakat Desa Garung Lor?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai terhadap rumusan masalah di atas, maka dari itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berbasis *Public Welfare* yang dijalankan oleh desa sehingga menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Menguji secara empiris Dampak Badan Usaha Milik Desa Berbasis *Public Welfare* berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil kajian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teori maupun praktek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kajian ini diharapkan bisa memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui partisipasi masyarakat pada pengelolaan sumber daya milik desa setempat. Serta bisa menjadi acuan dalam hal ilmu pengembangan ekonomi masyarakat.
 - b. Kajian ini sebagai referensi wacana yang diharapkan merubah wacana menjadi suatu tindakan nyata untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi mahasiswa, kajian ini bermanfaat untuk mahasiswa sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya serta sebagai referensi dan perbandingan antara teori yang diajarkan dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Bagi Masyarakat, diharapkan bisa memberikan saran terhadap masyarakat desa agar lebih berpartisipasi dalam

mengelola dan mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c. Bagi Peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini, maka peneliti bisa mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah, dapat mengembangkan pemikiran, menambah pengetahuan penulis serta mampu mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari terhadap keadaan yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, maka peneliti perlu memberitahukan sistematika penulisan skripsi, dimana sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal terdiri atas delapan halaman, yaitu meliputi: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi memuat secara garis besar yang terdiri atas tiga bab, antara bab 1 terhadap bab lain saling terhubung karena merupakan satu kesatuan yang utuh, ketiga bab itu yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab satu peneliti mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang *theory of publik welfare*, pengertian BUMDES, peran BUMDES, pengertian Desa, perbedaan Desa dan Kelurahan, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab empat berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP
Bab ini meliputi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

